

PENGUNGKAPAN ASPEK SOSIAL SESUAI STANDAR GRI 400 VERSUS KEPERCAYAAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Rizky Amalia¹, Andy Novendra Kharisma², Amrie Firmansyah^{3*}

¹⁾ 4132220051_kiky@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

²⁾ 4132220056_andy@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

³⁾ amriefirmansyah@upnvi.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

* penulis korespondensi

Abstract

This research aims to review the informativeness and comparability of non-financial reporting indicators on corporate social aspects of doing business following the Global Reporting Initiative (GRI) Standards. Apart from that, this research also reviews the alignment of GRI 400 indicators (social topics) to support achieving Sustainable Development Goals (SDGs). The research method used in this research is scoping review and content analysis. A scoping review is carried out by identifying literature from various reference sources related to GRI 400. Meanwhile, content analysis adds disclosure information required in the discussion review. The results of this research conclude that the GRI 400 indicators have supported the achievement of the SDGs. This research also provides suggestions for several indicators in the GRI 400 series quantitatively and cost-wise. It is hoped that the results of this research will be useful for local policymakers to consider proposals for additional information disclosed in sustainability reports and can increase stakeholders' trust in the sustainability reports presented.

Keywords: GRI 400, SDGs, Social Sustainability

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas keinformatifan dan komparabilitas indikator pelaporan non-keuangan pada aspek sosial perusahaan dalam melakukan bisnis sesuai dengan *Standar Global Reporting Initiative* (GRI). Selain itu, penelitian ini juga mengulas keselarasan indikator GRI 400 (topik sosial) dalam mendukung ketercapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *scoping review* dan analisis konten. *Scoping review* dilakukan dengan cara melakukan identifikasi literatur dari berbagai sumber referensi yang berkaitan dengan GRI 400. Sementara itu, analisis konten digunakan untuk menambahkan informasi pengungkapan yang diperlukan dalam ulasan pembahasan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa indikator GRI 400 telah mendukung ketercapaian SDGs. Penelitian ini juga memberikan usulan beberapa indikator dalam seri GRI 400 secara kuantitatif dan biaya. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk para pemangku kebijakan lokal untuk mempertimbangkan usulan tambahan informasi yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutan dan dapat menambah kepercayaan para pemangku kepentingan atas laporan keberlanjutan yang disajikan.

Kata Kunci: GRI 400, Keberlanjutan Sosial, SDGs

PENDAHULUAN

Pengetahuan dan bisnis yang semakin berkembang menginisiasi adanya pelaporan non keuangan oleh perusahaan. Publikasi pelaporan non keuangan menjadi elemen penting sekaligus solusi dari masalah sosial global yang umumnya melekat pada masyarakat modern, terlepas dari ukuran individu atas pembangunan ekonomi dan sosial masing-masing negara (Mysaka & Derun, 2022). Publikasi pelaporan non keuangan ini menjadi bukti akuntabilitas atas pertanggungjawaban *corporate social responsibility* (CSR) (saat ini lebih banyak dikenal dengan istilah keberlanjutan) dan sebagai bentuk ketaatan terhadap norma dan peraturan yang dibentuk publik. Namun, penilaian independen terhadap keandalan indikator pelaporan sebagai pemenuhan syarat publikasi dan kebutuhan bagi pengguna belum mencapai titik yang tepat. Isu relevansi dan keandalan informasi dalam pelaporan non keuangan sebagai sumber data untuk pengambilan keputusan dan penilaian kepatuhan perusahaan terhadap tujuan pelaksanaan keberlanjutan dan pembangunan berkelanjutan masih sangat terbuka. Regulasi pengungkapan dalam laporan keberlanjutan dinilai perlu untuk segera diimplementasikan karena saat ini para investor tidak hanya berfokus pada informasi perusahaan jangka pendek, namun juga informasi perusahaan jangka panjang (Farhana & Adelina, 2019). Oleh karena itu, terdapat kebutuhan



yang mendesak untuk menghilangkan kelemahan yang ada dalam pelaporan non-keuangan, yaitu dalam konten dan komparabilitas indikatornya.

Praktek pelaporan sukarela terhadap aspek non-keuangan telah dilakukan selama lebih dari 70 tahun (Bowen, 1953, Carroll, 2008, Mysaka & Derun, 2022). Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara pengungkapan informasi aspek sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnis perusahaan dan indikator keuangan keberhasilan bisnis perusahaan seperti pendapatan (Lapointe-Antunes et al., 2006), rasio pengembalian (Orlitzky, 2005), dan nilai pasar perusahaan (Aureli et al., 2020, Carnevale et al., 2012, Luffarelli & Awaysheh, 2018). Orlitzky (2005) menyimpulkan bahwa hubungan sebab akibat antara efisiensi sosial dan keuangan hampir sama. Oleh karena itu, indikator sosial yang tinggi dalam pelaporan dapat menjadi faktor penentu dan konsekuensi keberhasilan keuangan perusahaan.

Albers & Günther (2010) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mendorong perusahaan secara sukarela dalam mengungkapkan informasi tentang aspek sosial dari kegiatannya harus dipelajari secara mendalam. Pemahaman yang jelas tentang faktor-faktor penentu pengungkapan informasi aspek sosial dapat berguna bagi pengembang standar pelaporan sosial, perusahaan, dan untuk semua pemangku kepentingan pelaporan. Transparansi bisnis akan meningkat seiring dengan perbaikan sistematis fundamental dan prinsip-prinsip dasar berfungsinya mekanisme tersebut (Albers & Günther, 2010). Posisi manajemen yang mencakup direksi yang independen dan anggota tim yang beragam juga menentukan tingkat keandalan dan keinformatifan data keberlanjutan yang diungkapkan oleh perusahaan dalam pelaporan sukarela yang merupakan jaminan transparansi perusahaan atas implementasi keberlanjutan yang dilakukan oleh perusahaan.

Berbagai organisasi publik telah mengenalkan standar pelaporan non keuangan dengan menginisiasi pengembangan pedoman dan rekomendasi untuk penyajian informasi pembangunan berkelanjutan dan aktivitas keberlanjutan perusahaan. Setidaknya terdapat kurang lebih 30 praktik pelaporan berbeda yang digunakan perusahaan terkait dengan keberlanjutan (Brown et al., 2009). Needles et al. (2016) dan Tschopp & Nastanski (2014) menyatakan bahwa di antara pedoman penyajian informasi non keuangan, standar *Global Reporting Initiative* (GRI) merupakan standar yang paling banyak digunakan acuan dalam penyusunan laporan keberlanjutan oleh perusahaan.

Secara bertahap, standar GRI terbukti menjadi elemen penting dan cukup efektif untuk menjadi pendorong dalam praktek bisnis yang adil dan berkelanjutan (Brown et al., 2009; Jones et al., 2016; Moneva et al., (2006). Michalczuk & Konarzewska (2020) menyimpulkan bahwa pelaporan keberlanjutan berbasis GRI secara bertahap menjadi lebih bermakna. Selain itu, proses pembentukan dan publikasinya juga dianggap sebagai pengalaman manajemen yang diperlukan oleh perusahaan dalam meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik (Michalczuk & Konarzewska, 2020). Sementara itu, Willis (2003) menyatakan bahwa dengan potensi yang tersedia, praktik GRI pelaporan non-keuangan umumnya dapat mencapai tingkat yang setara dengan pelaporan keuangan dalam hal pemahaman publik, komparabilitas dan verifikasi. Hal tersebut yang akan meningkatkan efektivitas investasi yang bertanggung jawab secara sosial. Wilburn & Wilburn (2013) mempercayai bahwa pedoman GRI dan indikator kinerja sangat kuat sehingga harus menjadi dasar etis dari strategi keberlanjutan perusahaan dan mampu memberikan pemahaman yang jelas kepada para pemangku kepentingan terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Persyaratan indikator pelaporan non-keuangan perlu ditinjau secara berkala terhadap tren regulasi saat ini yang menjadi dasar yang memadai bagi para pemangku kepentingan dalam menilai tindakan keberlanjutan perusahaan.

Secara ekonomi, tingkat pertumbuhan komitmen perusahaan terhadap standar GRI di negara-negara maju dan berkembang menunjukkan bahwa standar GRI saat ini dianggap tidak hanya sebagai sarana penyebaran informasi tentang keberlanjutan, namun standar GRI juga

sebagai alat yang berkontribusi secara signifikan pada penciptaan nilai dan pemecahan masalah dengan legitimasi dan reputasi bisnis secara umum (Crisóstomo et al., 2017). Terkait dengan hal itu, saat ini pemerintah Indonesia memfokuskan untuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Manfaat dari pengungkapan laporan keberlanjutan berdasarkan standar GRI dan belum adanya kewajiban bagi instansi pemerintah dalam pengungkapan laporan keberlanjutan menjadi hal yang menarik untuk dikaji untuk mendukung tercapainya TPB/SDGs.

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas keselarasan indikator GRI 400 dalam mendukung ketercapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Selain itu, penelitian ini juga untuk memberikan analisis deskripsi GRI 400 dalam menanggapi kebutuhan pemangku kepentingan yang berkembang. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan melalui ulasan apakah pedoman GRI 400 telah memberikan indikator yang cukup agar informasi pelaporan non-keuangan dalam aspek sosial ini dapat berguna dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan dalam mengimplementasikan pedoman GRI 400 sebagai pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan aspek sosial. Bagi regulator, penelitian ini dapat digunakan sebagai indikator dalam formulasi kebijakan terkait dalam pencapaian SDGs yang berkaitan dengan aktivitas sosial.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Pemangku Kepentingan

Spence et al. (2012) menjelaskan bahwa banyak akademisi menganggap teori pemangku kepentingan sebagai teori utama dan paling efektif untuk memahami metode pelaporan berkelanjutan. Teori pemangku kepentingan menyatakan bahwa seluruh pemangku kepentingan mempunyai hak untuk memperoleh informasi terkait operasional perusahaan yang mempunyai pengaruh terhadap pengambilan keputusan perusahaan (Deegan, 2004). Teori ini bermaksud untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan perolehan nilai atas berbagai aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan sekaligus mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh pemangku kepentingan (Devi et al., 2017). Pemangku kepentingan mempunyai kewenangan untuk mendorong perusahaan agar memenuhi harapan pemangku kepentingan, termasuk menciptakan akuntabilitas dalam bentuk laporan keberlanjutan (Farhana & Adelina, 2019). Laporan keberlanjutan merupakan bentuk komunikasi antara manajemen dan pemangku kepentingan internal dan eksternal mengenai tindakan perusahaan dalam mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Massa et al., 2015).

Teori Legitimasi

Berbeda dengan teori pemangku kepentingan yang diawali dengan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan, Kresentia (2017) mendefinisikan teori legitimasi sebagai penekanan atas interaksi antara perusahaan dan masyarakat. Menurut teori legitimasi, perusahaan harus berfungsi sesuai dengan standar masyarakat agar masyarakat dapat menerima keberadaan perusahaan (Martens & Bui, 2023). Legitimasi sangat penting bagi bisnis karena dukungan masyarakat dipandang sebagai faktor kunci yang mempengaruhi pertumbuhan perusahaan (Utomo, 2019). Komitmen perusahaan terhadap standar GRI tidak hanya bertujuan untuk menyebarkan informasi, namun juga sebagai sarana untuk menghasilkan nilai besar dan penyelesaian masalah (Mysaka & Derun, 2022). Oleh karena itu, teori legitimasi digunakan untuk menjelaskan bagaimana substansi laporan keberlanjutan sesuai dengan standar masyarakat. Legitimasi perusahaan dapat terancam jika masyarakat meyakini bahwa perusahaan tidak menjalankan bisnisnya dengan cara yang tepat.

Keberlanjutan Sosial

Menurut *UN Global Compact*, keberlanjutan sosial harus menjadi bagian penting dari bisnis karena mempengaruhi kualitas hubungan bisnis dengan pemangku kepentingan (UN Global Compact, n.d.). Keberlanjutan sosial merupakan cara proaktif untuk mengelola dan mengidentifikasi dampak bisnis pada karyawan, pekerja dalam rantai nilai, pelanggan, dan masyarakat lokal. Perusahaan yang mengangkat pentingnya keberlanjutan sosial mengakui pentingnya hubungan perusahaan dengan orang, komunitas, dan masyarakat (UN Global Compact, n.d.). Tanggung jawab sosial menjadi bagian dari strategi inti bisnis perusahaan dan harus mempertimbangkan bagaimana kegiatan perusahaan mempengaruhi orang. Dalam menjalankan operasinya, perusahaan menanggung “biaya manusia” (UN Global Compact, n.d.). Bisnis yang berkelanjutan secara sosial akan mempertimbangkan keselamatan pekerjanya di lokasi tertentu. Hal ini tidak akan membiarkan keselamatan pekerjanya dikompromikan dengan memaksa mereka untuk bekerja di gedung yang dianggap tidak aman. Selanjutnya, hak asasi manusia sebagai landasan keberlanjutan sosial yang meluas ke bidang-bidang seperti hak asasi manusia kelompok tertentu, seperti tenaga kerja, kesetaraan gender, anak, masyarakat adat, dan pendidikan (UN Global Compact, n.d.).

Western Australia Council of Social Services (WACOSS) berpandangan bahwa keberlanjutan sosial terwujud saat berbagai proses formal dan informal, sistem, struktur, dan hubungan secara aktif memperkuat kemampuan generasi saat ini dan yang akan datang untuk membentuk komunitas yang sehat dan layak huni (WACOSS, 2023). Komunitas yang berkelanjutan secara sosial yaitu adil, majemuk, demokratis, terhubung, dan memberikan kualitas hidup yang optimal (WACOSS, 2023).

Henriques (2010) menyatakan bahwa dampak sosial mencakup apa pun yang mempengaruhi hubungan perusahaan-pemangku kepentingan: mulai dari seberapa banyak dan seberapa andal pemasok dibayar, hingga bagaimana suatu produk mempengaruhi kehidupan. Henriques (2010) juga menyatakan bahwa keberlanjutan sosial adalah investasi bisnis yang layak. Ketika pekerja dibayar secara adil dan bekerja di bawah kondisi kerja yang aman, mereka lebih sehat dan lebih produktif (Henriques, 2010). Pekerja yang lebih sehat dan lebih produktif kemudian diterjemahkan menjadi lebih banyak keuntungan bagi perusahaan (Henriques, 2010). Selain itu, perusahaan yang berkelanjutan secara sosial menikmati patronase konsumen yang lebih besar, karena konsumen cenderung mendukung bisnis yang memperlakukan pekerja mereka dengan adil (Henriques, 2010).

GRI 400

Global Reporting Initiative (GRI) adalah organisasi internasional yang membantu dunia usaha dan entitas lain mengungkapkan dampak operasi mereka. GRI menghasilkan standar GRI yang digunakan dalam pelaporan keberlanjutan. Standar ini mencakup praktik terbaik yang diakui secara global dalam mengungkapkan implikasi ekonomi, lingkungan, dan sosial kepada publik. Pelaporan keberlanjutan berdasarkan standar GRI menggambarkan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan. Kerangka kerja standar GRI membantu perusahaan dalam menemukan, mengumpulkan, dan melaporkan data dengan cara yang jelas dan dapat dibandingkan (Anggraeni & Djakman, 2018). Standar GRI dianggap sebagai referensi yang bereputasi baik dan lengkap karena telah dipublikasikan dan dimanfaatkan di seluruh dunia, dengan format laporan yang mendukung dan mencerminkan berbagai kepentingan (Anggraeni & Djakman, 2018).

Standar GRI merupakan standar dengan sistem modular yang terkait satu sama lain. Terdapat empat indikator pengungkapan dalam GRI Standards. Indikator GRI 100, GRI 200, GRI 300 dan GRI 400. Dalam GRI Standards, indikator GRI 400 mencakup 19 standar topik spesifik, yang bertujuan untuk mengungkapkan berbagai aspek kebijakan sosial perusahaan terhadap karyawan, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kesempatan yang sama,

aspek sosial hubungan dengan kelompok kunci mitra bisnis seperti pelanggan dan pemasok, serta peran perusahaan dalam bidang politik negara dan komunitas lokal (GRI, 2016). GRI 400 mencakup ketenagakerjaan, hubungan buruh/manajemen, kesehatan dan keselamatan kerja, pelatihan dan pendidikan, keberagaman dan kesetaraan kesempatan, non-diskriminasi, kebebasan berserikat dan berunding, pekerja anak, kerja paksa atau wajib, praktik keselamatan, hak-hak masyarakat adat, penilaian hak asasi manusia, komunitas lokal, penilaian sosial pemasok, kebijakan publik, kesehatan dan keselamatan pelanggan, pemasaran dan pelabelan, privasi pelanggan, dan kepatuhan sosial-ekonomi.

Pada akhir tahun 2021, GRI melakukan pembaharuan terhadap standar GRI yang sebelumnya diterbitkan di tahun 2016 menjadi standar GRI 2021. Saat ini, terdapat tiga rangkaian standar yang mendukung proses pelaporan keberlanjutan yang meliputi Standar Universal GRI, Standar Sektor GRI, dan Standar Topik GRI. Standar universal GRI berlaku untuk semua organisasi, sementara itu standar sektor GRI berlaku untuk sektor tertentu. Pengungkapan yang relevan terhadap setiap topik tertentu dapat menggunakan standar topik GRI dan juga membantu dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Perbedaan yang lain GRI Standards 2016 dalam penyusunan laporan keberlanjutannya dapat memilih *core* maupun komprehensif terhadap topik yang akan diulas. GRI Standards 2021 sudah tidak memberlakukan pemilihan ulasan *core* maupun komprehensif dan digantikan dengan “*disclosure*”. *Disclosure* GRI 2021 mengharuskan organisasi untuk menyajikan informasi sesuai yang diminta GRI Standards 2021. *Human rights* dalam standar baru ini menjadi hal wajib yang harus dilaporkan dalam laporan keberlanjutan sebagai tanggung jawab organisasi dalam menghormati hak asasi manusia (HAM). *Human rights* dalam standar baru ini tidak lagi sebagai standar topik terpisah yang disajikan saat organisasi menganggap topik tersebut dianggap material oleh organisasi pelapor, namun organisasi tersebut wajib mengungkapkan terkait dengan dampak HAM di laporan keberlanjutannya.

METODE

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *scoping review*. Adapun data penelitian dikumpulkan dengan cara melakukan identifikasi literatur dari berbagai sumber referensi yang berkaitan dengan GRI 400. *Scoping review* merupakan studi eksplorasi pendahuluan dilakukan sebagai bagian dari *systematic review* untuk menentukan fokus pencarian literatur (Saunders et al., 2019) Penelitian ini juga menggunakan analisis konten untuk mengetahui apakah indikator dalam seri GRI 400 dapat menjadi parameter dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Pilar Pembangunan Sosial dan mengusulkan pengungkapan tambahan yang diperlukan. Penelitian ini berfokus pada aspek sosial GRI 400. Untuk analisis konten yang dilakukan dalam penelitian menggunakan laporan keberlanjutan BPK tahun 2020 sebagai laporan keberlanjutan yang dipublikasikan oleh instansi pemerintah. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis untuk mencari *best practice* dari penerapan GRI pada sektor publik di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian GRI terhadap TPB/SDGs

Panduan laporan keberlanjutan dibentuk di Boston, Amerika Serikat diawali oleh GRI pada 1997, oleh *United Nations Environment Programme* (UNEP), *Coalition for Environmentally Responsible Economies* (CERES), dan *Tellus Institute*. GRI untuk pertama kalinya menghasilkan panduan laporan keberlanjutan pada tahun 2000. Dari awal diterbitkannya, GRI telah mengalami beberapa revisi. Pada umumnya revisi menggunakan pengkodean spesifik. GRI G2 atau versi 2 diterbitkan pada tahun 2002. Selanjutnya GRI G3, GRI G3.1, GRI G4 diterbitkan secara berurutan pada tahun 2006, 2011, dan 2013. GRI

membentuk *Global Sustainability Standard Board* (GRI GSSB) pada tahun 2015 yang secara spesifik memiliki tugas untuk menangani pengembangan standar laporan keberlanjutan. GSSB mulai memperkenalkan GRI Standards saat menjelang kuartal keempat tahun 2016, yang kemudian diluncurkan di Indonesia pada tahun 2017. GRI Standards direncanakan efektif berlaku pada tanggal 1 Juli 2018.

Di tengah panduan laporan keberlanjutan dikembangkan, agenda pembangunan dunia pasca tahun 2015 dikembangkan sebelum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB tentang MDGs tahun 2010, yang menandai berakhirnya Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). Dalam Sidang Umum PBB bulan September 2015, disepakati Agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2030 yang bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, dan inklusif. pembangunan, dan penerapan tata kelola yang mampu mempertahankan peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Untuk memudahkan pelaksanaan dan pemantauan terhadap 17 tujuan dan 169 target TPB/SDGs, penelitian ini telah pemetaan terhadap tujuan tersebut ke dalam empat pilar yaitu, pilar pembangunan sosial yang meliputi Tujuan 1, 2, 3, 4 dan 5; pilar pembangunan ekonomi yang mencakup Tujuan 7, 8, 9, 10 dan 17; pilar pembangunan lingkungan, meliputi Tujuan 6, 11, 12, 13, 14 dan 15, serta pilar pembangunan hukum dan tata kelola yang mencakup Tujuan 16.

Dari hasil analisis dengan membandingkan SDGs dari keempat pilar, terhadap pengungkapan GRI terdapat beberapa kesamaan yang dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan GRI 400 terhadap TPB atau SDGs

No	TPB	Tujuh Agenda Pembangunan	Standar GRI
1	Tanpa Kemiskinan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan berkeadilan	GRI 200 dan GRI 400
2	Tanpa Kelaparan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan berkeadilan	GRI 400
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	GRI 300 dan GRI 400
4	Pendidikan Berkualitas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	GRI 400
5	Kesetaraan Gender	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	GRI 200, GRI 400, GRI 100
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	GRI 300
7	Energi Bersih dan Terjangkau	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	GRI 300
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan berkeadilan	GRI 100, GRI 200, GRI 300, GRI 400,
9	Industri Inovasi dan Infrastruktur	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	GRI 200
10	Berkurangnya Kesenjangan	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	GRI 100, GRI 200, GRI 400

No	TPB	Tujuh Agenda Pembangunan	Standar GRI
11	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	GRI 200,
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	GRI 300 dan GRI 400
13	Penanganan Perubahan Iklim	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	GRI 200 dan GRI 300,
14	Ekosistem Lautan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	GRI 300
15	Ekosistem Daratan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	GRI 300
16	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	GRI 100, GRI 200, GRI 300, dan GRI 400
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	GRI 200

Dari Tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa terdapat keselarasan antara 17 tujuan SDGs dengan pengungkapan GRI. Secara spesifik dari aspek sosial, pilar pembangunan sosial pada Tujuan 1, 2, 3, 4, 5 telah terkoneksi dalam panduan *GRI Standards* 400. Oleh karena itu, seharusnya pengungkapan GRI 400 dapat dijadikan sebagai *tools* untuk meninjau capaian TPB/SDGs dalam aspek sosial serta mendorong tercapainya SDGs. Pengungkapan laporan keberlanjutan yang dikaitkan dengan SDGs di sektor publik adalah laporan keberlanjutan BPK tahun 2020 dengan menggunakan GRI sebagai standar pelaporannya. Usaha pengungkapan yang dilakukan di sektor publik tersebut membuktikan bahwa pengungkapan pada laporan keberlanjutan selaras dengan program-program SDGs Pemerintah.

Namun, kurangnya dukungan kebijakan dalam penerapan laporan keberlanjutan di sektor publik dapat diduga menjadi kendala terkait dengan masih terbatasnya instansi pemerintah di Indonesia yang membuat laporan keberlanjutan. Kesuksesan pencapaian SDGs bergantung pada Pemerintah sebagai regulator dan sekaligus menjadi pemangku kepentingan dalam penerapan GRI. Oleh karena itu, Pemerintah selaku salah satu pemangku kepentingan utama berhak mendorong organisasi pemerintahan untuk menyusun laporan keberlanjutan yang sekaligus sebagai pemantauan terhadap capaian SDGs yang menjadi tanggungjawab pemerintah.

Usulan Pengungkapan Tambahan GRI 400

Pengidentifikasi informasi tambahan dalam pelaporan keberlanjutan sesuai pedoman GRI 400 perlu dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah, keinformatifan dan keandalan pelaporan non-keuangan mengenai isu-isu sosial perusahaan. Pelaporan non-keuangan perlu ditingkatkan kualitas pengungkapannya. Keragaman standar pelaporan terkait dengan informasi non-keuangan mengakibatkan keragaman pendekatan (Needles et al., 2016). Keragaman laporan non-keuangan dapat menimbulkan dampak negatif pada sistem pelaporan bagi pemangku kepentingan yang merupakan elemen penting dalam pelaksanaan keberlanjutan (Chersan, 2016). Persepsi pelaporan menjadi sangat penting bagi pemangku kepentingan tidak

hanya terkait dengan legitimasinya, namun juga arah pengembangan keberlanjutan yang sejalan dengan tuntutan publik saat ini.

Menurut Cappuyns (2016), pengungkapan terkait aspek sosial dalam laporan berkelanjutan harus sesuai dengan regulasi, pedoman, dan prosedur yang berlaku di dalam satu negara tertentu. Uni Eropa telah berusaha menyelaraskan pelaporan berkelanjutan namun terdapat kendala perbedaan kerangka hukum di negara-negara anggotanya berbeda-beda (Aureli et al., 2019). Kendala tersebut memerlukan penelitian lanjutan yang membahas terkait regulasi untuk dapat mengadaptasi standar GRI di berbagai negara. Studi terapan perlu dilakukan untuk mengembangkan arah kebijakan terkait dengan regulasi yang mirip dengan Dewan Standar Akuntansi Internasional. Dengan demikian, para pembuat kebijakan publik di Uni Eropa diharapkan dapat mendelegasikan GRI untuk mengembangkan dan meningkatkan standar pelaporan non-keuangan dengan maksud untuk penggabungan lebih lanjut ke dalam undang-undang nasional atau menggunakannya sebagai praktik secara umum.

Berdasarkan ulasan-ulasan dari literatur penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa masih terdapat peluang untuk pengembangan standar yang berkaitan dengan standar GRI 400. Oleh karena itu, terdapat beberapa usulan pengungkapan tambahan terhadap GRI 400 sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Usulan Pengungkapan Informasi Tambahan GRI 400

No	Standar	Usulan Pengungkapan Informasi Tambahan GRI 400
1	GRI 401 - Kepegawaian	Alasan pergantian karyawan sebagai bahan evaluasi manajemen
2	GRI 402 - Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen	Jumlah karyawan yang terpengaruh atas perubahan operasional signifikan
3	GRI 403 - Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Biaya perusahaan untuk membayar kompensasi atas sakit yang diderita pegawai dalam melaksanakan pekerjaan
4	GRI 404 - Pelatihan dan Pendidikan	Hasil <i>assesment</i> terhadap pegawai pasca pelatihan dan pendidikan
5	GRI 405 - Keanekaragaman dan Kesempatan Setara	Program perusahaan untuk menciptakan kesempatan setara bagi pegawai
6	GRI 406 - Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan	Waktu dan penanggungjawab atas tindak lanjut untuk mengurangi kemungkinan/dampak atas insiden diskriminasi
7	GRI 407 - Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif	Kasus pelanggaran atas hak pegawai dalam kebebasan berserikat dan berunding kolektif
8	GRI 408 - Pekerja Anak	Jumlah pegawai usia non-legal per kategori pegawai beserta gajinya
9	GRI 409 - Kerja Paksa atau Wajib Kerja	Jumlah insiden kerja paksa
10	GRI 410 - Praktik Keamanan	Jumlah kasus pelanggaran HAM petugas keamanan
11	GRI 411 Hak hak masyarakat adat	Kasus pelanggaran hak-hak masyarakat adat yang dilakukan pemasok
12	GRI 412 Penilaian hak asasi manusia	Hasil Assesment pengetahuan terhadap pegawai terkait HAM
13	GRI 413 Masyarakat lokal	Jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk program sosial bagi masyarakat lokal
14	GRI 414 Penilaian Sosial Pemasok	Nilai transaksi dengan pemasok yang berisiko

No	Standar	Usulan Pengungkapan Informasi Tambahan GRI 400
		signifikan terhadap dampak sosial perusahaan
15	GRI 415 Kebijakan Publik	Alasan perlunya perusahaan berkontribusi pada aktivitas politik
16	GRI 416 Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan	Nilai produk (layanan) yang berisiko berdampak bagi kesehatan dan keselamatan pelanggan
17	GRI 417 Pemasaran dan Pelabelan	Jumlah denda yang dibayarkan atas ketidakpatuhan terhadap aturan pelabelan dan pemasaran
18	GRI 418 Privasi Pelanggan	Tindak lanjut keluhan atas pelanggaran privasi pelanggan
19	GRI 419 Kepatuhan Sosial Ekonomi	Tindak lanjut untuk memperbaiki praktik kerja yang mengakibatkan ketidakpatuhan sosial ekonomi

Selain usulan-usulan pengungkapan tersebut, regulator di Indonesia perlu untuk menyeleraskan standar yang akan digunakan dengan aspek hukum yang ada di Indonesia. Penelitian terapan yang membahas aspek hukum dan akuntansi keberlanjutan di Indonesia saat ini sangat diperlukan untuk mendapatkan penyesuaian yang lebih optimal untuk penerapan pelaporan keberlanjutan yang ideal di Indonesia.

PENUTUP

Simpulan

Pelaporan keberlanjutan yang berkaitan dengan aspek sosial sebagaimana GRI 400 telah sejalan dengan SDGs pilar sosial. Terkait hal tersebut, pelaporan keberlanjutan sebagaimana standar GRI 400 dapat dijadikan sebagai alat dalam memantau capaian SDGs di Indonesia. Di sektor publik, laporan keberlanjutan yang dianggap relevan dengan implementasi SDGs pernah dibuat oleh BPK di tahun 2020. Namun, belum terdapat publikasi lebih lanjut di tahun-tahun berikutnya. Laporan keberlanjutan yang telah diterbitkan oleh BPK di tahun 2020 setidaknya menunjukkan bahwa pengungkapan laporan berkelanjutan dapat disinergikan dengan program SDGs pemerintah.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, standar yang diulas yaitu standar GRI 400 masih menggunakan standar yang diterbitkan pada 2016, padahal terdapat standar yang terbaru, standar GRI yg diterbitkan tahun 2021 telah mengalami beberapa pembaharuan. Kedua, usulan atas tambahan pengungkapan pada laporan keberlanjutan hanya berdasarkan analisis konten saja berkaitan dengan literatur yang dikumpulkan dan tidak melalui survei kebutuhan dari para pemangku kepentingan. Ketiga, penelitian ini hanya memandang dari bidang keilmuan akuntansi saja, sehingga perlu adanya penelitian dari bidang keilmuan hukum untuk melihat kesesuaian antara laporan berkelanjutan aspek sosial dengan undang-undang, pedoman, dan prosedur yang berlaku di Indonesia.

Saran

Penelitian selanjutnya perlu terdapat adanya usulan atas tambahan pengungkapan pada laporan berkelanjutan dapat melalui survei kebutuhan dari para pemangku kepentingan untuk mendapatkan ulasan yang lebih komprehensif. Penelitian ini mengindikasikan bahwa Badan Penyusun Standar Laporan Keberlanjutan perlu meningkatkan indikator secara kuantitatif khususnya yang berkaitan dengan GRI 400, sehingga dapat mendorong komparabilitas dan keinformatifan dari aspek-aspek sosial. Selanjutnya, sesuai kewenangannya, pemerintah dapat

membuat kebijakan yang mewajibkan sektor publik untuk dapat menyusun laporan keberlanjutan dan menyelaraskan dengan program SDGs pemerintah. Selain itu, penerapan GRI 400 ini juga mempertimbangkan aspek hukum agar laporan keberlanjutan aspek sosial telah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Albers, C., & Günther, T. (2010). Disclose or not disclose: determinants of social reporting for STOXX Europe 600 firms. *Zeitschrift für Planung & Unternehmenssteuerung*, 21, 323-347.
- Aureli, S., Gigli, S., Medei, R., & Supino, E. (2020). The value relevance of environmental, social, and governance disclosure: Evidence from Dow Jones Sustainability World Index listed companies. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 27(1), 43-52.
- Aureli, S., Magnaghi, E., & Salvatori, F. (2019). The role of existing regulation and discretion in harmonising non- financial disclosure. *Accounting in Europe*, 16(3), 290–312. doi:10.1080/17449480.2019.1637529.
- Anggraeni, D. Y., & Djakman, C. D. (2018). Pengujian terhadap kualitas pengungkapan CSR di Indonesia. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 2(1), 22-41. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA).
- BPK RI. (2021). *Laporan Berkelanjutan BPK tahun 2020*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan. <https://www.bpk.go.id/page/laporan-berkelanjutan-bpk>
- Brown, H. S., de Jong, M., & Levy, D. L. (2009). Building institutions based on information disclosure: lessons from GRI's sustainability reporting. *Journal of cleaner production*, 17(6), 571-580. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2008.12.009>
- Cappuyns, V. (2016). Inclusion of social indicators in decision support tools for the selection of sustainable site remediation options. *Journal of Environmental Management*, 184(1), 45-56. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2016.07.035>
- Carnevale, C., Mazzuca, M., & Venturini, S. (2012). Corporate social reporting in European banks: The effects on a firm's market value. *Corporate social responsibility and environmental management*, 19(3), 159-177. <https://doi.org/10.1002/csr.262>
- Chersan, I.-C. (2016). Corporate responsibility reporting according to Global Reporting Initiative: an international comparison. *Audit Financiar*, 14(4-136), 424-435. <http://dx.doi.org/10.20869/AUDITF/2016/136/424>
- Crisóstomo, V. L., Prudêncio, P. D. A., & Forte, H. C. (2017). An analysis of the adherence to GRI for disclosing information on social action and sustainability concerns. In *Advances in Environmental Accounting & Management: Social and Environmental Accounting in Brazil* (pp. 69-103). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/S1479-359820160000006002>
- Deegan, C. (2004). *Financial accounting theory*. Australia: McGraw-Hill Education.
- Devi, S., Budiasih, I. G. N., dan Bedera, I. D. N. (2017). Pengaruh pengungkapan enterprise risk management dan pengungkapan intellectual capital terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 14(1), 20–45. <https://doi.org/10.21002/jaki.2017.02>
- Farhana, S., & Adelina, Y. E. (2019). Relevansi nilai laporan keberlanjutan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(3), 615-628. <http://dx.doi.org/10.21776/ub.jamal.2019.10.3.36>
- GRI. (2016). *GRI Standards*. Amsterdam: Global Sustainability Standards Board (GSSB).
- Henriques, A. (2010). *Corporate impact: Measuring and managing your social footprint*. Earthscan. <http://dx.doi.org/10.4324/9781849774901>



- Jones, P., Comfort, D., & Hillier, D. (2016). Managing materiality: a preliminary examination of the adoption of the new GRI G4 guidelines on materiality within the business community. *Journal of Public Affairs*, 16(3), 222-230. <https://doi.org/10.1002/pa.1586>
- Kresentia, I. (2017). Pengaruh pengungkapan Islamic corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) periode 2012-2015. (Thesis Universitas Atma Jaya Yogyakarta). <http://e-journal.uajy.ac.id/12939/>.
- Lapointe-Antunes, P., Cormier, D., Magnan, M., & Gay-Angers, S. (2006). On the relationship between voluntary disclosure, earnings smoothing and the value-relevance of earnings: The case of Switzerland. *European accounting review*, 15(4), 465-505. <https://doi.org/10.1080/09638180601102040>
- Luffarelli, J., & Awaysheh, A. (2018). The impact of indirect corporate social performance signals on firm value: Evidence from an event study. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 25(3), 295-310. <https://doi.org/10.1002/csr.1468>
- Martens, W. & Bui, C.N.M. (2023) An exploration of legitimacy theory in accounting literature. *Open Access Library Journal*, 10, 1-20. <https://doi.org/10.4236/oalib.1109713>
- Massa, L., Farneti, F., & Scappini, B. (2015). Developing a sustainability report in a small to medium enterprise: process and consequences. *Meditari Accountancy Research*, 23(1), 62-91. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-02-2014-0030>
- Michalczuk, G., & Konarzewska, U. (2020). Standardization of corporate social responsibility reporting using the GRI framework. *Optimum. Economic Studies*, (1 (99), 74-88. <http://dx.doi.org/10.15290/oes.2020.01.99.06>
- Moneva, J. M., Archel, P., & Correa, C. (2006). GRI and the camouflaging of corporate unsustainability. *Accounting Forum*, (30)2, 121-137. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2006.02.001>.
- Mysaka, H., & Derun, I. (2022). GRI 400 as a Contemporary tool to increase trust in corporate social responsibility. *Calitatea*, 23(187), 256-270. <https://doi.org/10.47750/QAS/23.187.32>
- Needles, B. E., Frigo, M. L., Powers, M., & Shigaev, A. (2016). Integrated reporting and sustainability reporting: An exploratory study of high performance companies. *Performance measurement and management control: Contemporary issues*, 31, 41-81. <https://doi.org/10.1108/S1479-351220160000031019>
- Orlitzky, M. (2005). Social responsibility and financial performance: Trade-off or virtuous circle. *University of Auckland Business Review*, 7(1), 37-43. https://www.researchgate.net/publication/284499852_Social_responsibility_and_financial_performance_Trade-off_or_virtuous_circle
- Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019). *Research methods for business students eight edition*. Qualitative Market Research: An International Journal.
- Spence, L. J., Agyemang, G., & Rinaldi, L. (2012). *Environmental aspects of sustainability: SMEs and the role of the accountant*. Association of Chartered Certified Accountants.
- Tschopp, D., & Nastanski, M. (2014). The harmonization and convergence of corporate social responsibility reporting standards. *Journal of business ethics*, 125, 147-162. <https://doi.org/10.1007/s10551-013-1906-9>
- UN Global Compact (n.d.). *Sosial sustainability*. <https://unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/social>
- Utomo, A. S. 2019. Pengaruh csr, roi, roe terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 4(1), 82-94. <https://doi.org/10.51289/peta.v4i1.377>

- WACOSS. (2023). 2022 sustainable funding survey report.
<https://www.wacoss.org.au/library/2022-sustainable-funding-survey-report/>
- Wilburn, K., & Wilburn, R. (2013). Using global reporting initiative indicators for CSR programs. *Journal of Global responsibility*, 4(1), 62-75.
<https://doi.org/10.1108/20412561311324078>
- Willis, A. (2003). The role of the global reporting initiative's sustainability reporting guidelines in the social screening of investments. *Journal of Business Ethics*, 43, 233-237.
<https://doi.org/10.1023/A:1022958618391>

